

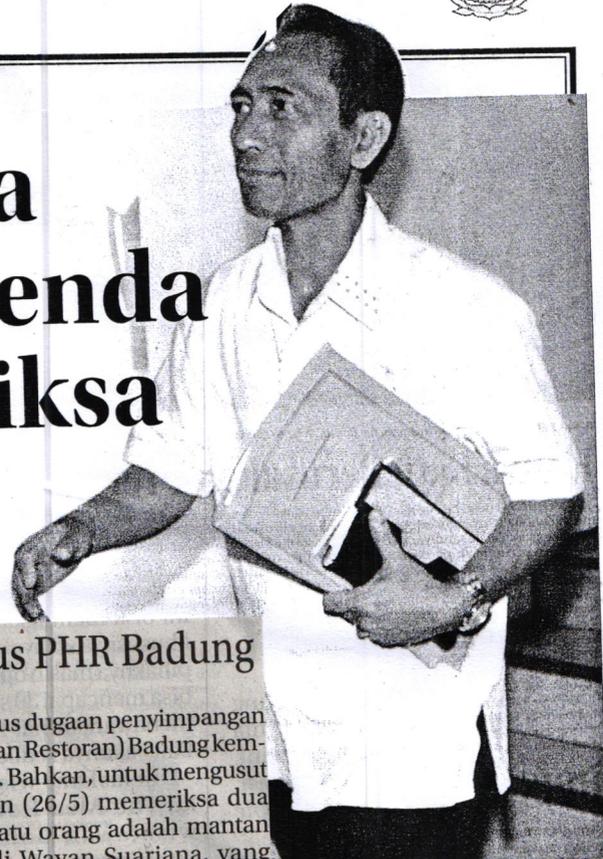


## Radar Bali



DIPERIKSA SOAL PHR: Kadispenda Denpasar Dewa Semadi (kiri) dan mantan Kadispenda Bali Wayan Suarjana (kanan) saat berada di Kejati Bali, kemarin.

# Dua Kadispenda Diperiksa



### Terkait Kasus PHR Badung

DENPASAR - Kasus dugaan penyimpangan PHR (Pajak Hotel dan Restoran) Badung kembali dialami kejati. Bahkan, untuk mengusut Kejati Bali kemarin (26/5) memeriksa dua pejabat penting. Satu orang adalah mantan Kadispenda Bali Wayan Suarjana, yang saat ini Sekwan DPRD Bali. Dia diperiksa lantaran ketika proses PHR bermasalah dia menjadi Kadispenda. Selain itu juga memeriksa Kadispenda Kota Denpasar Dewa Semadi.

Untuk Suarjana diperiksa oleh jaksa Ketut Yasa dan Suasti. Sedangkan untuk Semadi diperiksa oleh jaksa Made Tangkas. "Belum, belum saya belum bisa jelaskan," ungkap Semadi,

ketika dikejar beberapa awak media.

Dia kemudian masuk ke ruang jaksa Tangkas. "Kami intinya meminta data - data terkait dengan PHR. Lantaran ada juga penyimpangan PHR oleh pemkot," ungkap Tangkas.

Sedangkan Suarjana mengatakan hanya menyerahkan data

► Baca Dua... Hal 35

Edisi : Rabu, 27 Mei 2015  
Hal : 21



## Radar Bali

Sambungan - -

# Periksa Dua Orang Lagi

### DUA...

Sambungan dari hal 21

dia datang didampingi salah satu personel dari Karo Hukum. "Kami hanya menyerahkan data," ujar Suarjana usai diperiksa di Kejati Bali. Kemudian dia naik mobil dan meninggalkan Kejati Bali. Seperti halnya berita sebelumnya, kasus ini terendus media setelah anggota dewan Sentana diperiksa di kejati. Sentana membawa surat panggilan tertanggal 30 April 2015. Surat itu bernomor PK-90/P.1.5./Fd.1/04/2015. Yang memanggil Sentana selaku anggota dewan dari Fraksi Gerindra. Dia dipanggil untuk membawa dokumen - dokumen menyangkut penyimpangan dana PHR, termasuk PHR yang dibagikan ke enam kabupaten di Bali. Yaitu Karangasem, Klungkung, Bangli, Tabanan, Jembrana, dan Buleleng. Dia juga mengatakan sebelumnya, sempat ramai terkait dengan selisih pertang-

gungjawaban nominal PHR di APBD tahun 2014. Seingat dia untuk tahun 2014 nilainya Rp 260 miliar, namun muncul selisih mencapai Rp 41 miliar. Bahkan, pihak jaksa juga akan mencari data ke DPRD Badung nantinya.

Sementara itu, dugaan korupsi perjalanan dinas (Perdin) di Pemkot Denpasar yang ditangani Kejari Denpasar dilanjutkan dengan pemeriksaan dua orang saksi kemarin. Mereka adalah Kabag Keuangan Sekretariat Dewan Pemkot Denpasar Made Suwirta dan Kasubag Perbendaharaan Ni Made Ardani.

Dua orang ini datang ke Kejari Denpasar pada pukul 09.00. Untuk Suwirta diperiksa oleh jaksa Gusti Widana. Sedangkan Ardani diperiksa oleh jaksa Lumi Sendi. "Mereka diperiksa terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Dalam kasus ini, yaitu terkait kasus perjalanan dinas di Pemkot Denpasar," ungkap Kasi Intel Kejari Denpasar Syahrir Sagir kemarin di Kejari Denpasar.

Syahrir juga mengatakan pemeriksaan dilakukan secara maraton. Bahkan, nantinya jika ada saksi yang sebelumnya sudah diperiksa, namun diperlukan keterangannya akan dipanggil kembali. "Kalau diperlukan, nanti dipanggil lagi. Kami kerja cepat ini," ungkap Syahrir sembari masih sibuk ikut memproses kelengkapan data.

Selain itu, di ruang jaksa Luga Harlianto, yang juga jaksa penyelidikan terlihat kesibukan luar biasa. Berkas yang jumlahnya sangat banyak, dibebankan di lantai untuk nantinya disortir sesuai dengan kunjungan yang dilakukan.

Seperti halnya berita sebelumnya, terkait dengan permainan perjalanan dinas Pemkot Denpasar didapatkan data bahwa realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 432.473.819.954 (Rp 432 miliar lebih) atau realisasi 90,11 persen dari anggaran sebesar Rp 479.965.974.075 (Rp 479 miliar lebih). Dari belanja barang dan jasa, itu terdapat belanja perjala-

nan dinas di Kota Denpasar Rp 32.437.260.848 (Rp 32,4 miliar lebih). Hingga akhirnya dilakukan pemeriksaan selisih harga, secara detail termasuk dikaitkan dengan bukti fisik tiket Garuda Airlines termasuk dengan harga dasar tiket. Ditemukan ada dana yang tidak sesuai Rp 565.553.334 (Rp 565 juta lebih). Atau kelebihan membayar sebesar Rp 565 juta lebih.

Tak hanya itu pemeriksaan atas 4.982 lembar bukti tiket Garuda Indonesia, senilai Rp 10,4 miliar lebih pada 34 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) juga didapatkan selisih antara bukti fisik tiket sebanyak 933 lembar tiket dengan harga Rp 2,4 miliar lebih. Selain itu juga didapatkan adanya perjalanan dinas yang fiktif dengan nilai Rp 15 juta lebih. Dugaan perjalanan dinas fiktif ini ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar, Dinas Perhubungan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. (art/yes)

Edisi : Rabu, 27 Mei 2015

Hal : 21



## Radar Bali

# Jabatan Suwitra Ternyata Belum Dicabut

### Pasca Ditahan di Lapas Singaraja

**SINGARAJA** - Jabatan Kabid Bina Marga belum dicabut dari tangan Made Suwitra. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan di Lapas Singaraja, hingga kini Suwitra masih menjabat sebagai Kabid Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum Buleleng.

Kepala Inspektorat Buleleng Putu Yasa yang ditemui Selasa (26/5) kemarin, mengaku sudah menyurati sejumlah lembaga penegak hukum di Provinsi Bali. Diantaranya Polres Buleleng, Polda Bali, Kejaksaan Negeri Singaraja, dan Kejaksaan Tinggi Bali. Inspektorat masih menunggu surat resmi

pemberitahuan penahanan dari lembaga penegak hukum, sehingga bisa merekomendasikan langkah strategis.

Yasa mengaku tidak tahu secara pasti instansi mana yang melakukan penahanan terhadap Made Suwitra. "Kami tahunya *kan* yang bersangkutan itu dijadikan tersangka di Polda Bali. Sekarang yang berwenang masalah penahannya ini siapa, kami belum tahu. Apakah Kejati atau Kejari. Kami masih menunggu surat pemberitahuan penahanan," kata Yasa.

Rencananya inspektorat akan merekomendasikan penggantian pejabat, karena posisi Kabid Bina Marga sangat strategis dalam proyek fisik di Kabupaten Buleleng. Lantaran posisi

Kabid Bina Marga mewajibkan pejabat yang menduduki posisi itu, menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam proyek rehabilitasi jalan.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Buleleng Nyoman Gede Suryawan yang dihubungi terpisah, mengakui jika kekosongan pejabat di posisi Kabid Bina Marga, cukup menyulitkan operasional di Dinas Pekerjaan Umum. Lantaran ada beberapa proyek yang harus dikerjakan pada tahun ini, dan kabid bina marga harus menjadi pejabat pembuat komitmen.

Selain itu ada beberapa proyek yang sudah terlanjut ditandatangani Made Suwitra, dan sudah berjalan. "Masalahnya sekarang sudah harus

masuk masa pembayaran. Kalau tidak ditandatangani PPK, *ya nggak* bisa keluar uangnya itu. Mau tidak mau ini *kan* pengaruh juga ke proyek yang sudah berjalan," kata Suryawan.

Suryawan mengaku sudah melapor kepada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, dan berharap ada langkah-langkah strategis yang bisa dihasilkan. Termasuk berkonsultasi dengan Inspektorat dan Badan Pertimbangan Kepangkatan (Bapek) Buleleng.

"Kalau perlu kami juga konsultasi dengan kejaksaan nanti, supaya tidak menyalahi aturan hukum perdata dan tata usaha negara," tandas Suryawan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kabid Bina Marga Made Suwitra, ditahan di Lapas Sing-

araja, karena diduga melakukan kesalahan administrasi, yang menyebabkan kerugian

negara. Suwitra sengaja ditahan di Lapas Singaraja, dengan pertimbangan lokasi pelangga-

ran hukum, saksi, dan barang bukti yang lebih banyak ada di Buleleng. (eps/gup)

Edisi : Rabu, 27 Mei 2015

Hal : 33



## Radar Bali



MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

SAAT BERSAKSI UNTUK CANDRA: Ni Made Anggara Junisari (tengah) saat bersaksi untuk terdakwa Wayan Candra di Pengadilan Tipikor Denpasar 5 Maret lalu.

### KOMISI I

## Rakor, DPRD Bali Soroti Kinerja KPID

DENPASAR - Komisi I DPRD Bali menilai kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bali periode sekarang lebih buruk dari KPID periode sebelumnya. Penegasan itu disampaikan anggota Komisi I DPRD Bali Gusti Putu Widjra dalam rapat koordinasi (rakor) dengan KPID Bali, kemarin (26/5). Rapat koordinasi dipimpin Ketua Komisi I Ketut Tama Tenaya dan anggota komisi di antaranya; Komang Nova Sewi Putra, Ngakan Made Samudra, Nyoman Adnyana, dan AA Kompyang Raka.

Sementara KPID sendiri dihadiri ketuanya, AA Rai Sahadewa dan lengkap dengan semua anggotanya. Rapat ini terkait tanggapan KPID akan sebuah pemberitaan media yang mana kejadiannya bukan terjadi di Bali, melainkan di Nusa Tenggara Barat (NTB). "Saya menilai kinerja KPID sekarang ini jauh lebih jelek kalau dibandingkan dengan kinerja KPID periode sebelumnya," semprot Gusti Putu Widjra di depan komisioner KPID Bali.

Edisi : Rabu, 27 Mei 2015

Hal : 27



## Radar Bali

FOTO-FOTO: AGUNG BAYU/BALI EXPRESS

# Wijaya Ingin Cepat Sidang

## Dalam Kasus Adhi Karya dan PIPANISASI

**DENPASAR** - Mantan Kepala Divisi PT Adhi Karya Divisi III Wilayah VI (Bali, NTB, dan NTT), Wijaya Imam Santoso (WIS) akhirnya menjalani proses tahap dua kasus pibanisasi. Ini adalah kasus kedua Wijaya. Sebelumnya, dia sudah ditahan dalam kasus korupsi di perusahaannya PT Adhi Karya dengan kerugian negara Rp 15 miliar.

"Saya intinya menjalani proses hukum. Saya kena dua kasus, kalau bisa nanti sidang berbarengan saya lebih bagus. Biar lebih cepat," ujar Wijaya sambil tak henti-henti tersenyum ■

► *Baca Wijaya... Hal 35*



AGUNG BAYU/BALI EXPRESS

**TETAP SENYUM:** Tersangka kasus pibanisasi Wijaya Imam Santoso (tengah) saat berada di Kejati Bali, kemarin.

Edisi : Rabu, 27 Mei 2015

Hal : 21



## Radar Bali

# Anggap Ini Jalan Hidupnya

### ■ WIJAYA...

*Sambungan dari hal 21*

Sebelumnya, mantan Kadis PU Karangasem I Wayan Arnawa sudah divonis. Kemudian satu tersangka IB Made Oka sudah tahap kedua dan ditahan.

Proses pelimpahan tahap dua, bagi Wijaya dilakukan oleh penyidik Polda Bali. Diantar oleh penyidik yaitu IB Widana Jati dan Gusti Atna ke Kejati Bali. Dikawal dua polisi dengan senjata lengkap, kemudian Wijaya sempat menunggu lama di halaman Kejati Bali. Kemudian datang Kasi Penuntutan Bidang Pid-sus Kejati Bali Gede Arthana dan mempersilakan Wijaya ke lantai dua. "Ayo proses ke atas," ujar Arthana.

Kemarin (26/5) sempat memang ada harapan pihak penyidik, tahap dua hanya di kejati. Lantaran posisi Wijaya adalah tahanan di Lapas Kerobokan. "Kalau bisa di kejati saja, kalau

ke Karangasem lagi nanti balik bawa tahanan ke Kerobokan lagi," jelas Widana Jati.

Namun, mekanisme pelimpahan tahap kedua memang mewajibkan ke Karangasem. Kemarin, akhirnya proses administrasi ke Kejari Karangasem juga. Saat proses tersebut, dia terus tersenyum dan dia juga tidak masalah dibidik oleh kamera wartawan. Tidak seperti tersangka atau terdakwa korupsi lainnya yang kerap menyembunyikan wajah jika dibidik kamera wartawan. "Saya harus jalani, ini jalan hidup saya," ujarnya.

Seperti halnya berita sebelumnya, Wijaya lebih awal sudah ditahan oleh jaksa agung. Dan, sidangnya sudah mulai di pengadilan tipikor, namun sidang perdana tertunda terkait kesiapan pengacara. Tim jaksa melakukan penyitaan satu unit rumah milik WIS di Jalan Tukad Yeh Sungai, Renon. Rumah tersebut bera-

da di blok Perumahan Living Sungai Nomor 6 C. Dalam kasus ini, menimbulkan kerugian Rp 15 miliar.

Terkait dengan kasus pipanisasi, dia ditetapkan sebagai tersangka lantaran proyek tersebut digarap oleh PT Adhi Karya. Hasil audit terakhir nilai kerugian dari kasus pipanisasi adalah Rp 3.704.323.702 atau Rp 3,7 miliar. Selain itu, kasus ini juga sudah menetapkan tersangka lain, seperti Bupati Karangasem Wayan Geredeg, pihak PT Adhi Karya Wijaya Imam Santosa, pihak PT Adhi Karya Parno Trihardiono, jajaran panitia pengadaan yaitu Komang Yasa (Ketua Panitia), Gusti Bagus Budi Adnyana (Sekretaris Panitia), Ketut Sukarja, Ketut Putra, Komang Eli Kusuma, dan Ni Made Ariadi. Tim pengawas Ni Kadek Novianti. Sedangkan Arnawa sudah divonis 1,5 tahun jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa 3,5 tahun. (art/yes)

Edisi : Rabu, 27 Mei 2015

Hal : 35